

PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN DAWARBLANDONG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Dawarblandong Tahun Anggaran 2026. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Dawarblandong Tahun 2026 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Maret 2026
CAMAT DAWARBLANDONG

AKHMAD TAUFIQ, S.Sos.,MM.
Pembina
NIP. 19700626 199003 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja dilakukan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, dalam pelaksanaannya, dinamika pembangunan dan perubahan situasi dan kondisi dapat menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap Renja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun sebagai respons terhadap perubahan asumsi, kebijakan nasional/daerah, kondisi ekonomi, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Perubahan ini juga mempertimbangkan perkembangan kondisi aktual, seperti refocusing anggaran, realokasi program, pergeseran prioritas pembangunan, atau penyesuaian terhadap target dan capaian kinerja.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengikuti pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang mengusung visi: “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur.” Visi ini kemudian dijabarkan dalam lima misi pembangunan daerah, di mana Misi Pertama yaitu “Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2026. Sasaran Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 adalah “Terwujudnya pelayanan publik yang optimal”.

Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai dokumen induk tahunan pemerintah daerah, perubahan RKPD menjadi dasar utama bagi penyusunan perubahan Renja. Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan plafon anggaran dalam Perubahan RKPD. Tema pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah “Penguatan Ekonomi Inklusif dan SDM Unggul dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif.” Kecamatan berperan dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal untuk memastikan pelayanan cepat, tepat, bersih dan transparan.

Renstra Perangkat Daerah meskipun bersifat jangka menengah (5 tahunan), Renstra menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa perubahan Renja tetap dalam koridor sasaran strategis dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Perubahan Renja menjadi dasar teknokratis bagi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam merinci perubahan kegiatan, target output, dan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas baru.

Dengan demikian, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 bukan hanya merupakan upaya administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan program dan kegiatan pembangunan daerah tetap adaptif, responsif, dan efektif menjawab tantangan pembangunan yang dinamis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PePerubahan Rencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Permendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 (Perubahan atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021). Permendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 (Perubahan Kedua). Kepmendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025 (Perubahan Ketiga);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2026;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 04 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2045

33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029
34. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
35. Surat keputusan Camat Dawarblandong Nomor : 188.45/13/416-317/2026 tentang Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2026 dimaksudkan sebagai upaya untuk menyesuaikan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan dinamika dan perubahan yang terjadi, baik dari aspek kebijakan, kondisi keuangan, maupun kebutuhan pembangunan aktual. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2026 ini menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan capaian sasaran strategis RPJMD Kabupaten Mojokerto.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Menyesuaikan program dan kegiatan dengan perubahan kebijakan Nasional, Provinsi, maupun Daerah;
2. Menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kondisi faktual, pagu indikatif anggaran, serta hasil evaluasi capaian kinerja;
3. Menjamin konsistensi dan sinergi antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra PD, RKPD) dengan dokumen penganggaran (RKA dan DPA);
4. Mengakomodasi masukan dan aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.2. Review terhadap Perubahan RKPD

Membandingkan antara rancangan P-RKPD dengan Analisis Kebutuhan.

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemaangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2026

3.2. *Tagging Tematik*

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2026 bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi capaian kinerja, baik yang menyebabkan ketidaktercapaian, ketercapaian, maupun capaian yang melampaui target. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi dasar dalam melihat dampak capaian terhadap arah pembangunan jangka menengah serta sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat dan responsif ke depan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Dawarblandong sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan progres yang cukup baik. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan II Tahun 2026 terdiri dari 3 program dan 9 kegiatan serta 22 sub kegiatan dengan anggaran Rp 3.383.074.000 dari hasil realisasi keuangan sebesar Rp 1.692.599.602 atau 50,03 % sedangkan realisasi kinerja 39,98 % (kategori sedang). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KINERJA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,	50,43%	49,21%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6,76%	0,00%
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46,56%	45,95%

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :
 - a. Tidak ada Kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target sebagaimana direncanakan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :
 - a. Seluruh Kegiatan dan sub kegiatan telah memenuhi target sebagaimana direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :
 - a. Tidak ada Kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target sebagaimana direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab yang mungkin timbul akibat tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu :
 - a. Jadwal pelaksanaan yang tersebar sepanjang tahun serta belum masuk pada tahapan realisasi;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, bila target kinerja tidak tercapai sebagaimana direncanakan yaitu :
 - a. Target Renstra tidak tercapai sebagaimana yang direncanakan;
 - b. Menurunnya nilai evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - c. Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah;
 - d. Program/kegiatan menjadi tidak cost-effective, berdampak pada evaluasi keuangan tahunan;
 - e. Membutuhkan revisi terhadap dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD, dan APBD Perubahan);
 - f. Tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RPJPD) tidak tercapai sesuai waktu yang direncanakan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu :
 - a. melaksanakan monitoring secara rutin pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Dawarblandong;
 - b. melakukan koordinasi lintas bidang dan optimalisasi manajemen pelaksanaan untuk menjaga konsistensi capaian dan efisiensi pelaksanaan program kedepannya;
 - c. memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan data dan informasi;Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada table berikut ini :

TABEL 2.0 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dawarblandong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2025 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,48	74,40	81	81,05	100,06	81,25	83,31	
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan	1 Inovasi		1 Inovasi	1 Inovasi	100%	1 Inovasi	1 Inovasi	

		tersosialisasi serta berkelanjutan								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	81%	100	100	100%	100	100	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	6 dokumen	18 laporan	18 laporan	100%	17 laporan	17 laporan	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran PD yang dapat tercapai	90%	81%	86,25	86,17	99,91%	87,35	96,58	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	28 laporan	24 orang/bulan	24 orang/bulan	100%	23 orang/bulan	23 orang/bulan	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	17 Dokumen	30 laporan	NA	NA	NA	NA	NA	

		Pelaksanaan Tugas ASN								
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN Kecamatan Dawarblandong	67,15	65,21	66	66	100%	78,25	85,59	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Stel	NA	NA	NA	NA	NA	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	90%	100	100	100	100%	100%	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	

7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 bulan	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 Dokumen	12 bulan	365 dokumen	365 dokumen	100	365 dokumen	365 dokumen	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%	90 %	100%	100%	100%	100%	100%	

		Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan								
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	12 laporan	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	2 orang	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	12 laporan	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	100%	90 %	100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Gedung	3 unit	2 Gedung	2 Gedung	100%	2 gedung	2 gedung	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	25 Unit	1 paket	21 unit	21 unit		10 unit	10 unit	
7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	500 Dokumen	500 Dokumen	300	300	100%	100%	100%	
7.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	0 Dokumen	15 Dokumen						

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	16 Laporan	385 Dokumen	300	300	100%	1.000	1.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	82%	81%	82	82	100%	100%	100%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	84 dokumen	60 fasili-tasi	23 fasili-tasi	23 fasili-tasi	100%	23 fasilitasi	23 fasilitasi	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	28 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	16 dokumen	16 dokumen	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan	20 Dokumen	12 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	16 dokumen	16 dokumen	

	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	16 dokumen	16 dokumen	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	24 Dokumen	24 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100%	18 dokumen	18 dokumen	

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (TC-29) Kabupaten Mojokerto

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dari target nilai Sakip sebesar 81,25 tercapai 0,00 atau 0,00%
 - a. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target 100 % tercapai target 49%
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari target 7 dokumen tercapai 3 Dokumen atau 48,25 % dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 1.735.600 dari pagu sebesar Rp. 3.000.000
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target sebesar 17 laporan tercapai 8 laporan atau 49,74 % dengan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target 97,25 % tercapai target 50 %
 - Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan dari target sebesar 288 orang pertahun dicapai sebesar 144 orang selama 6 bulan atau 50% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.480.297.028 dari pagu sebesar Rp. 2.924.574.000.
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target sebesar 100 % tercapai sebesar 50%
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen listrik / Penerangan Bangunan Kantor dari target sebesar 1 paket terealisasi sebesar 1 paket atau 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.970.500 dari pagu sebesar Rp. 8.995.800.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dari target sebesar 0 Paket dapat direalisasikan sebesar 0 paket atau 0 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 dari pagu sebesar Rp. 9.558.000
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor dari target sebesar 12 bulan tercapai 6 Bulan atau 56,83 % dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 34.078.723 dari pagu sebesar Rp. 59.971.400.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan dari target sebesar 1 paket dapat direalisasi sebesar 0 paket atau 0

- % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.659.950 dari pagu sebesar Rp. 7.493.250.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dari target sebesar 365 dokumen tercapai target sebesar 178 dokumen atau 49,84 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.200.000 dari pagu sebesar Rp. 2.245.200.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dari target sebesar 1 paket tercapai sebesar 0 paket atau 0,0 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.300.150 dari pagu sebesar Rp. 17.159.750.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dari target sebesar 60 laporan dapat dicapai sebesar 30 laporan atau 50% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari target 100 % tercapai sebesar 50 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari target sebesar 12 laporan dapat dicapai sebesar 6 Laporan atau 50 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.585.415 dari pagu sebesar Rp. 46.187.200.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari target sebesar 12 laporan tercapai 6 laporan atau 25 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.500.000 dari pagu sebesar Rp. 41.400.000.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari target sebesar 100 % dapat dicapai sebesar 50 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dari target sebesar 2 Unit tercapai 1 unit atau 50% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.824.950 dari pagu sebesar Rp. 39.989.400.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dari target sebesar 2 Unit dapat dicapai sebesar 1 unit atau 48,22 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.821.600 dari pagu sebesar Rp. 10.000.000.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dari target 8 unit tercapai sebesar 4 unit atau 50 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.091.500 dari pagu sebesar Rp. 10.000.000,00
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari target capaian 100 % belum dapat diukur hal ini disebabkan karena kegiatan dan sub kegiatan belum optimal terlaksana mengingat kegiatannya dilakukan di semester 2 tahun 2026
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan belum dapat diukur capaian kinerja nya karena kegiatan dilakukan pada semester 2.
- 3) Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa dari target sebesar 100 % tercapai kurang lebih sebesar 50 %.
- Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahanh Desa dari target sebesar 6 fasilitas tercapat 3 fasilitas atau 50 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.285.843 dari pagu sebesar Rp. 18.500.000.
 - Sub Kegiatan Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dari target sebesar 6 fasilitasii tercapat 3 fasilitas atau 50 % dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 11.845.800 dari pagu sebesar Rp. 23.500.000.
 - Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dari target sebesar 12 fasilitas tercapai 6 fasilitas atau 50 % dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 7.600.000 dari pagu sebesar Rp. 29.200.000.
 - Sub Kegiatan Fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan dari target 18 fasilitas dapat dicapai sebesar 9 fasilitas atau 50 % dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 8.942.800 dari pagu sebesar Rp. 110.500.000.

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan

Dawarblandong Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.2 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.2 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan
Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standar t Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catata n Analisi s
				Tahu n 2024 (n-2)	Tahu n 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahu n 2027 (n+1)	Tahu n 2024 (n-2)	Tahu n 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahu n 2027 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IKM Kecamatan			88,75	89	90,78	91	89,97	90,03	90,78	91	Baik
2	Presentase Peningkatan Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Baik
3	Persentase hasil koordinasi yang ditindak lanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Baik
4	Nilai Sakip Perangkat Daerah			81	81,25	81,75	82,05	81,05	83,31	81,75	82,05	Baik
5	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			87,35	97,30	97,50	98,15	97,27	95,	97,50	98,15	Baik
6	Indeks Profesionalitas ASN			83,00	84,00	84,55	85,05	83,59	85,59	84,55	85,05	Baik

7	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi serta berkelanjutan			1	1	1	1	1	1	1	1	Baik
---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	------

2.2. Review Terhadap Perubahan RKPD

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2026) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk dilakukan perubahan atas dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026. Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.

Dalam upaya pencapaian tujuan strategis RPJMD yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel, dan Responsif.” Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen RKPD 2026 Kabupaten Mojokerto disusun dengan tema pembangunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah: “Penguatan Ekonomi Inklusif dan SDM Unggul dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif.”

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Wilayah adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 3) Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa

Sesuai dengan Pagu anggaran indikatif dalam Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp. 3.679.574.000 yang bisa dilihat pada tabel 2.3 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.3 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
 Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
 Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dawarblandong											
NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					tagging
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Dawarblandong	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,32	3.165.323.479	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Dawarblandong	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,32	3.165.323.479	
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase indikator program yang tercapai sesuai target	100%	6.600.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase indikator program yang tercapai sesuai target	100%	6.600.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3.300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3.300.000	
						Kertas HVS				626.800	
						Photo Copy				1.089.450	

						Penjilidan				1.972.950	
						SPPD				700.000	
						karbon				250	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	3.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	3.300.000	
						Kertas HVS				548.450	
						Foto Copy				961.650	
						Penjilidan				2.051.300	
						SPPD				700.000	
						Karbon				250	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	90%	2.896.812.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	90%	2.896.812.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dawarblandong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang / bulan	2.896.812.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dawarblandong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang / bulan	2.948.863.000	
						Gaji ASN selama 14 bulan				1.355.158.000	
						TPP				1.166.265.000	
						TOL				58.200.000	
						Honorarium PPTK 18 orang perbulan					

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	91.830.837	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	91.830.837	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	5.124.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	5.124.000	
						lampu dll				5.124.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	33.176.150	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket	33.176.150	
						PC (Komputer Dekstop)				10.719.000	
						Printer				4.344.000	
						Tablet				16.551.400	
						Kursi Rapat				1.375.800	
						Karbon				185.950	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	27.169.800	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	27.169.800	
						mamin rapat				24.743.000	
						mamin tamu				1.403.000	
						Honorarium PPTK				1.010.000	
						Karbon				13.800	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7.481.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7.481.500	
						banner, amplop dll				7.481.500	
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 dokumen	2.700.000	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 dokumen	9.756.800	
						langganan koran				2.700.000	
						Jasa Iklan reklame				7.052.800	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	11.579.387	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Dawarblandong	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	11.579.387	
						atk				2.199.850	
						kertas HVS				6.0240400	
						Tinta				3.354.000	
						Karbon				1.137	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	4.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	4.600.000	
						sppd dalam kota				4.600.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	78.000.192	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	78.000.192	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	38.400.192	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	38.400.192	
						listrik				38.400.192	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	39.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	41.525.000	
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	100%	0	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	100%	0	
	Pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah unit kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0 unit	0	Pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah unit kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		0	
						beroda 4				0	
						beroda 2				0	
	Pengadaan mebel	Kec. Dawarblandong	jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	0	Pengadaan mebel	Kec. Dawarblandong	jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	0	
						kursi dan meja tamu			2 set	0	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	92.080.450	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dawarblandong	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	92.080.450	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 kendaraan	59.990.450	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 kendaraan	59.990.450	
						bbm				34.241.000	
						suku cadang				25.749.450	
	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	2 gedung	22.230.000	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	2 gedung	22.230.000	
						Jasa Tenaga Kebersihan Kantor				22.230.000	KLA
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9.860.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9.860.000	
						pemeliharaan AC				6.100.000	
						Pemeliharaan Audio				1.000.000	
						pemeliharaan printer				2.760.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dawarblandong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	0	
						perbaikan kamar mandi				0	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Dawarblandong	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	7.169.600	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Dawarblandong	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	7.169.600	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dawarblandong	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1100 pelayanan	7.169.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dawarblandong	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1100 pelayanan	7.169.600	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	16 laporan	7.169.600	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	16 laporan	7.169.600	
						Rapat Koordinasi Dengan Sekdes dan Staff				2.706.500	
						Sosialisasi Inovasi Pelayanan				383.700	
						Sosialisasi dan Layanan KTP				0	IKM

						Pembinaan dan Evaluasi				2.357.800	
						SPPD				700.000	
						Honor PPTK				1.010.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	143.875.500	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	143.875.500	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	70 fasilitasi	143.875.500	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	70 fasilitasi	143.875.500	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	8.128.800	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	8.128.800	
						Rapat Evaluasi Perdes				2.776.800	

						Pembinaan Pemerintahan Desa				2.776.800	
						Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa				0	
						Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				0	
						Rapat Koordinasi Lembaga Pemerintahan Desa				0	
						Pembinaan Kepala Dusun				965.200	
						Peningkatan Kapasitas LPM				0	
						Bantuan Transport Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa				0	
						SPPD Dalam Kota				600.000	
						Honorarium PPTK				1.010.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen	17.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Dokumen	17.000.000	
						Pra Musrenbang				1.537.300	
						Musrenbang				11.524.800	
						Pelatihan Pengelola Administrasi Keuangan BUMDes				0	
						Pelatihan Pengelola Administrasi Keuangan PUEM				0	

						Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Desa				0	
						Rapat Koordinasi Pelaporan Bantuan Keuangan Desa				0	
						Pembinaan Lomba Desa				0	
						Bantuan Trasport Monitor Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa				0	
						SPPD Dalam Kota				600.000	
						Honorarium PPTK				1.010.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	16 Dokumen	22.099.800	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	16 Dokumen	28.099.800	
						Honorarium Tim Forkopimca				19.500.000	
						Upacara 17 Agustus				13.989.800	
						Malam Tasyakuran dan setelah Upacara				0	
						Pembinaan Linmas				0	
						SPPD				600.000	
						Honorarium PPTK				1.010.000	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	20 Dokumen	96.746.700	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	20 Dokumen	102.746.700		
						Pleno PKK				18.307.200	PKK	
						Lomba PKK				0		
						Kegiatan PKK				7.583.400		
						Pembinaan Forum anak dan Karang Taruna				3.576.500	KLA	
						Kegiatan MTQ				2.666.800		
						Sosialisasi dan Evaluasi Stunting				3.009.800	STUNTING	
						Tasyakuran Malam 17 Agustus				6.392.700		
						Sapi Qurban				50.133.400		
						Rakor persiapan safari ramadhan				2.426.500		
						Lomba Hadrah				4.000.000		
						Honor PPTK				5.050.000		
						SPPD				6.000.00		
JUMLAH					3.316.468.379	JUMLAH					3.316.468.379	

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan melihat data capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Dawarblandong sampai dengan Tribulan I, diperlukan upaya-upaya percepatan realisasi baik untuk realisasi kinerja dan keuangan. Namun demikian ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang terkena efisiensi dan ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang mengajukan perubahan anggaran karena adanya tambahan kegiatan.

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan karena adanya penambahan anggaran diantaranya adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan Penambahan pagu anggaran sebagai berikut :
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk rincian belanja jasa iklan/reklame mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 7.052.800
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan karena efisiensi dan Penambahan pagu anggaran sebagai berikut :
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk rincian Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan secretariat tim pelaksana kegiatan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 4.500.000, dan pada sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan untuk rincian Pleno PKK mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan Penambahan pagu anggaran sebagai berikut :
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN untuk rincian belanja Gaji dan Tunjangan ASN mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 52.015.000
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan Penambahan pagu anggaran sebagai berikut :
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk rincian belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mendapat tambahan anggaran

sebesar Rp. 1.925.000.

Adapun rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Dawarblandong Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1. berikut ini:

TABEL 3.1. RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

KABUPATEN / KOTA : MOJOKERTO
KECAMATAN : DAWARBLANDONG

KODE						PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN			ANGGARAN			TAMBAH (KURANG)
								SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH EFISIENSI	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH EFISIENSI	SETELAH PERUBAHAN	
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000				KECAMATAN DAWARBLANDONG					4.724.152.000	4.724.152.000	3.316.468.379	1.407.683.621
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,31	-	83,33	4.269.152.000	4.269.152.000	3.174.610.487	1.094.541.513
							Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi				
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	100%	100%	36.000.000	36.000.000	6.300.000	29.700.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	15.000.000	15.000.000	3.300.000	11.700.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	17 laporan	17 laporan	21.000.000	21.000.000	3.300.000	17.700.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	97,30%	97,30%	97,30%	2.759.553.546	2.759.553.546	2.948.863.000	-189.309.454
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/bulan	23 orang/bulan	23 orang/bulan	2.759.553.546	2.759.553.546	2.948.863.000	-189.309.454

37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	392.100.000	392.100.000	91.830.837	300.269.163
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	5.124.000	4.876.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	220.000.000	220.000.000	33.176.150	186.823.850
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	85.000.000	85.000.000	27.169.800	57.830.200
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	7.481.500	2.518.500
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 dokumen	365 dokumen	365 dokumen	4.600.000	4.600.000	9.752.800	5.152.800
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	25.000.000	25.000.000	11.579.387	13.420.613
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	150 laporan	150 laporan	37.500.000	37.500.000	4.600.000	32.900.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	99.818.454	99.818.454	87.587.200	12.231.254

37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	58.418.454	58.418.454	38.400.192	20.018.262
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	41.400.000	41.400.000	41.525.000	125.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	293.000.000	293.000.000	92.080.450	200.919.550
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	75.000.000	75.000.000	59.990.450	15.009.550
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	178.000.000	178.000.000	22.230.000	155.770.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	8 unit	8 unit	30.000.000	30.000.000	9.860.000	20.140.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	8 unit	8 unit	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	55.000.000	55.000.000	7.169.600	47.830.400

37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1000 Pelayanan	1000 Pelayanan	1000 Pelayanan	55.000.000	55.000.000	7.169.600	47.830.400
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	55.000.000	55.000.000	7.169.600	47.830.400
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	400.000.000	400.000.000	143.975.300	256.024.700
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	42 Fasilitasi	42 Fasilitasi	63 Fasilitasi	400.000.000	400.000.000	143.975.300	256.024.700
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	120.000.000	120.000.000	8.128.800	111.871.200
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	60.000.000	60.000.000	17.000.000	43.000.000
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	33 Dokumen	60.000.000	60.000.000	28.099.800	31.900.200
37	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	6	02.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	160.000.000	160.000.000	102.746.700	57.253.300

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dawarblandong Tahun 2026 ini disusun sebagai respons terhadap perkembangan situasi dan kondisi aktual, baik dari sisi kebijakan, capaian program, maupun kebutuhan masyarakat yang muncul sepanjang tahun berjalan. Perubahan Renja ini merupakan penyesuaian terhadap dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, serta tetap mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dawarblandong sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah.

Dengan adanya dokumen Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2026 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kecamatan Dawarblandong dapat berjalan lebih adaptif, terarah, dan tepat sasaran sesuai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, serta sebagai instrumen evaluasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan Dawarblandong.

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2026

- a. Perubahan Renja Kecamatan harus selaras dan konsisten dengan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. Perubahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja semester sebelumnya, baik dari aspek fisik maupun keuangan;
- c. Aspirasi masyarakat dan hasil Musrenbang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari pendekatan partisipatif;
- d. Perubahan kegiatan/program harus mempertimbangkan kemampuan riil anggaran, termasuk kebijakan refocusing atau penghematan belanja;
- e. Penyusunan perubahan Renja harus dilakukan dengan koordinasi intensif bersama OPD teknis dan Dawarblandong, terutama untuk kegiatan yang bersifat lintas sektor atau dukungan teknis dari dinas lain;
- f. Proses penyusunan Perubahan Renja wajib mengikuti jadwal dan tahapan resmi yang ditetapkan oleh Dawarblandong sesuai peraturan perundang-undangan;

- g. Perubahan Renja harus mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan sebagai bagian dari sistem evaluasi pembangunan daerah.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2026

- a. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan harus mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. Perubahan Renja harus selaras dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya;
- c. Penyusunan harus mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan aktual;
- d. Proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan pemangku kepentingan utama;
- e. Indikator kinerja harus jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkala;
- f. Penyusunan harus realistis dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran;

4.3. Rencana Tindak Lanjut dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2026

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan OPD yang memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan Kecamatan;
- b. Memastikan kesesuaian antara usulan Kecamatan dengan program prioritas OPD teknis;
- c. Menyelaraskan hasil Perubahan Renja Kecamatan dengan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
- d. Menyampaikan hasil Perubahan Renja kepada seluruh unit kerja dan perangkat kecamatan;
- e. Mempersiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sesuai hasil perubahan untuk semester selanjutnya;
- f. Menyusun rencana pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan hasil Perubahan Renja.

Akhirnya, penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2026 ini merupakan wujud komitmen Kecamatan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan secara berkelanjutan.

Mojokerto, Maret 2026
CAMAT DAWARBLANDONG

AKHMAD TAUFIQ,S.Sos.,MM.
PEMBINA TK. I
NIP. 197006261990031006

